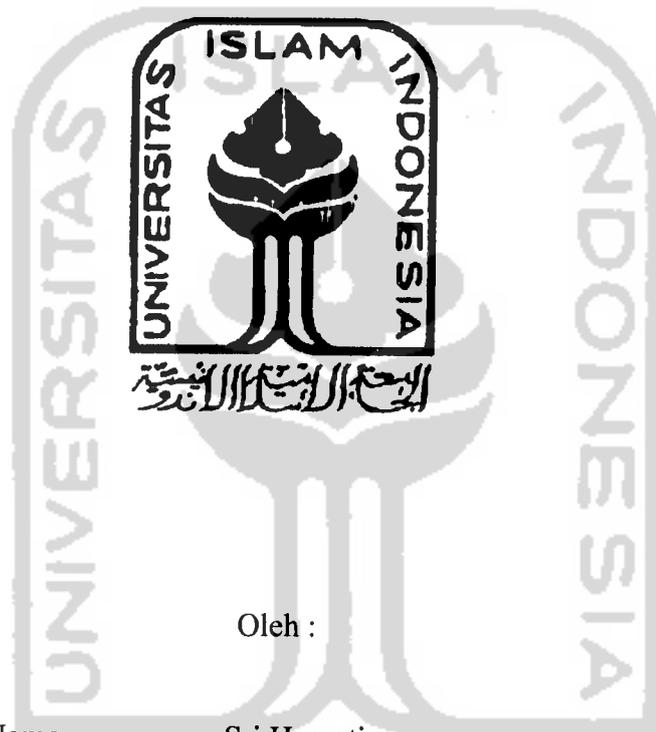


Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah
Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun 1998-2000 dan 2001-2003

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Sri Haryati

No Mahasiswa : 01 313 206

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006

Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah
Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun 1998-2000 dan 2001-2003

SKRIPSI

Disusun dan di ajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
Guna memperoleh gelar sarjana strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

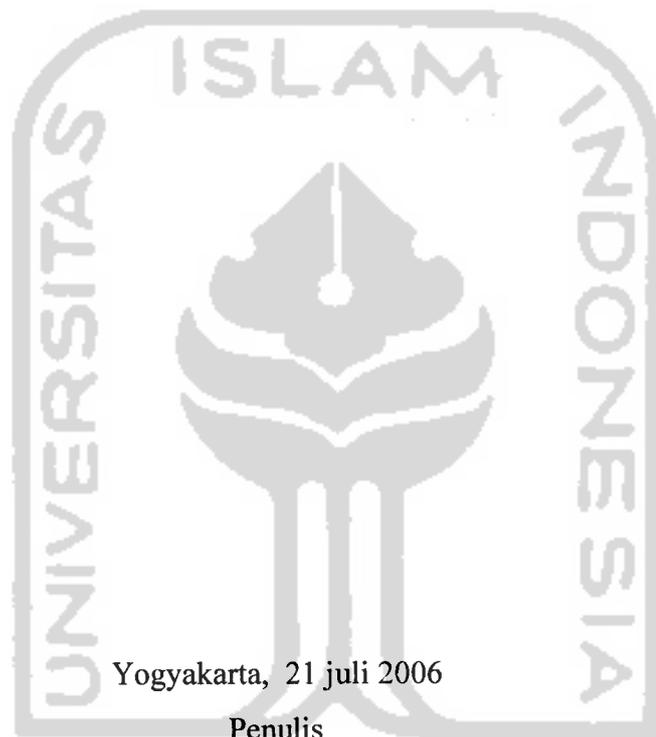
Oleh :

Nama : Sri Haryati
No Mahasiswa : 01 313 206
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISM

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Haryati', is written over the watermark logo.

Sri Haryati

PENGESAHAN

**PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH
SEBELUM DAN SESUDAH KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 1998-2000 DAN 2001-2003**



Oleh :

Nama : Sri Haryati
No Mahasiswa : 01313206
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta,

Telah disetujui dan di sahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Edy Sundi Hamid', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Edy Sundi Hamid, Mec

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Perbandinagn Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998 - 2000 dan 2001 - 2003

**Disusun Oleh: SRI HARYATI
Nomor mahasiswa: 01313206**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 23 Juni 2006

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec

Penguji I : Drs. Priyonggo Suseno, M.Sc

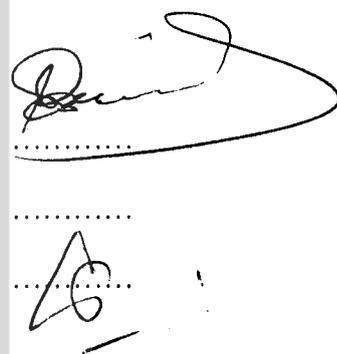
Penguji II : Drs. Akhsyim Afandi, MA

Mengetahui

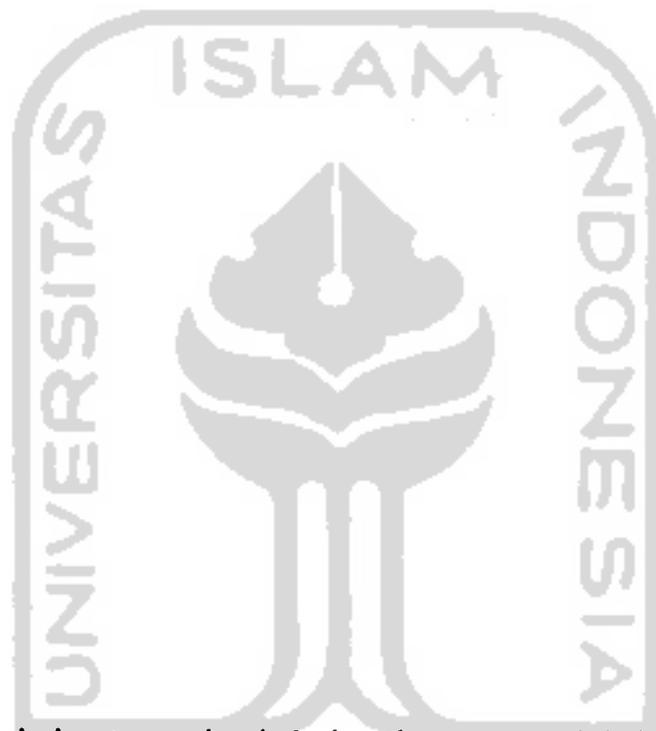
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Zonni Ishak, M.Bus, Ph.D

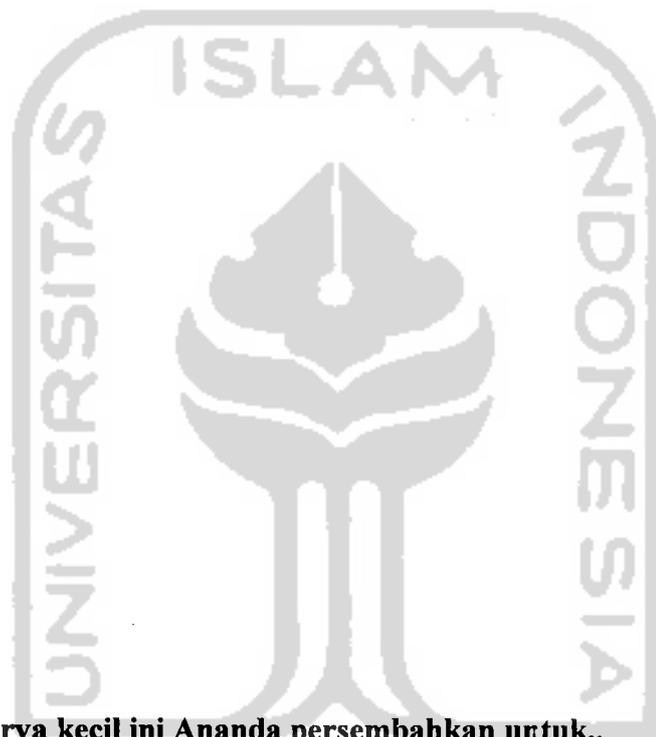


HALAMAN MOTTO



Percayalah akan kekuatan sebuah Do'a, dan percayalah bahwa akan selalu ada petunjuk dari Allah dalam setiap langkah kita menapaki jalan kehidupan ini. Cari, gali dan temukan rasa percaya itu dalam hatimu. Sebab, saat kita telah percaya, maka petunjuk itu akan datang dengan tanpa disangka.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya kecil ini Ananda persembahkan untuk..

Ibunda tercinta...

Ayahanda tercinta..

Dan kakanda tersayang..

(terimakasih atas do'a, semangat, cinta dan kasih sayang, Bunda, Yahnda dan

Kakanda berikan untuk Ananda)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Aihamdulillah kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2000 dan 2001-2003” ini. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar jenjang strata 1 Program Studi Ekonomi Pembangunan pada fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia. Secara singkat skripsi ini berisi perbandingan kinerja keuangan daerah yang meliputi derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah), kebutuhan fiskal (*fiscal need*), kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), upaya fiskal (*tax effort*) di Kabupaten Sleman pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Tidak terpungkiri, terselesaikannya skripsi ini tidaklah lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Asmai Ishak, M. Bus, Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, Mec. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Bapak Drs. Priyonggo Suseno, M.Sc dan Bapak Drs. Akhsyim afandy, MA selaku Dosen Penguji Skripsi.
4. Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

6. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Ibu Siti Fatmah dan Bapak Muhyanta. Do'a, kasih sayang, kesabaran, serta perjuangan kalian adalah semangat dan kekuatan bagiku. Aku sayang kalian.....
7. Kakakku tersayang mas Threzt.. makasih atas Doa dan supportnya. Eh buruan nikah.. aku pengen cepet punya ponakan, he he...
8. Miss Warni Aisyah *my second mom*... Terimakasih atas do'a dan semangatnya..
9. Mr. Dee.. Hmm.. maukah kau menjadi bagian dari hidupku?.. Hueks!!..
10. Keluarga besar di Temanggung Sutirto Wahyudiharjo dan keluarga besar bani Arafah di Wonosobo, Mbah Putri, Biyung, Pak Dhe-Bu Dhe, Paklik- bulik, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik,etc.. terimakasih atas Do'a dan semangatnya...
11. Sahabatku Mrs. Wahyu n Mr. Willy (Pasangan jiwa) makasih ya atas semuanya.. wah.. kalau nggak ada kalian, nggak tau deh gimana nasibku! He he..
12. Temen2 Kost with couple, Tj's_Made, Lily_Ridwan, Cepty_Cemul, Lia_Agung, Mbak Arni_Mas koko, Giby_Barit, Kembars_Guntur, indah Sah, Ikah, Yanthi.
13. Temen2 mainku. Indah_Mas Agung, Renita_Rizal, Sistha, Atenk, Topex, Adit, Ijul, Agung, Mbak nicz, Wishnu, Dodik, Cemet_Rany, Tinggils, Santos, Om felix.
14. Temen2 KKN X-BT 82. Aa, Dedy, Abu, Ipunk, Budenk, Zaki, Rendra, Wikan, Elvy, Fenty, Pinky, Wulan. Eh Kapan kita kumpul lagi?!...

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masih diperlukan perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul.....	i
Halaman pernyataan bebas plagiarism.....	ii
Halaman pengesahan skripsi	iii
Halaman pengesahan ujian	iv
Halaman inoto.....	v
Halaman persembahan	vi
Halaman kata pengantar	vii
Halaman daftar isi.....	ix
Halaman daftar tabel	xi
Halaman daftar lampiran.....	xii
Halaman abstraksi	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	7
1.3 Tujuan penelitian.....	8
1.4 Manfaat penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penelitian.....	10
BAB II GAMBARAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN..	12
2.1 Keadaan geografis.....	12
2.2 Gambaran keuangan daerah.....	13
BAB III KAJIAN PUSTAKA	16
3.1 Penelitian Sudono Susanto	16
3.2 Penelitian Yuliati.....	16
3.3 Penelitian Jasagung Hariyadi.....	17
3.4 Penelitian Kifliansyah	18

3.5 Penelitian Lilis Setiyarti	19
BAB IV LANDASAN TEORI	23
BAB V METODE PENELITIAN	37
5.1 Lokasi penelitian	37
5.2 Variabel penelitian	37
5.3 Jenis dan sumber data	39
5.4 Metode Analisis Data	40
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
6.1 Derajat Desentralisasi Fiskal (Tingkat Kemandirian Daerah)	43
6.2 Kebutuhan Fiskal (<i>fiscal need</i>)	50
6.3 Kapasitas Fiskal (<i>fiscal capacity</i>)	51
6.4 Upaya Fiskal (<i>tax effort</i>)	52
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	55
7.1 Kesimpulan	55
7.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Proporsi Dana Perimbangan Terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2003	7
2.1 Kabupaten Sleman.....	12
2.2 Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2003	15
6.1 Prosentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Penerimaan Daerah	44
6.2 Prosentase Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Total Penerimaan Daerah	46
6.3 Prosentase Sumbangan Daerah Terhadap Total Penerimaan Daerah	48
6.4 Kebutuhan Fiskal Tahun 1998-2003	50
6.5 Kapasitas Fiskal Tahun 1998-2003	51
6.6 Upaya Fiskal Sebelum Otonomi Daerah Tahun Tahun 1998-2003.....	52
6.7 Upaya Fiskal Setelah Otonomi Daerah Tahun 1998-2003.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I. Data penelitian.....	59
1. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2003	59
2. Data Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Sleman Tahun 1998-2003	60
3. Data Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sleman Tahun 1998-2003	60
4. Data Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Sleman Tahun 1998-2003	61
5. Data Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2003	61
6. Data Pengeluaran Pemerintah Propinsi DIY Tahun 1998-2003	62
7. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 1998-2003.....	62
8. Data Jumlah Penduduk Propinsi DIY Tahun 1998-2003	63
9. Data Jumlah Kabupaten Propinsi DIY Tahun 1998-2003.....	63
10. Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 1993 Kabupaten Sleman Tahun 1998-2003	64
11. Data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sleman Tahun 1998-2003	64
12. Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 1993 Propinsi DIY Tahun 1998-2003.....	65
13. Data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Propinsi DIY Tahun 1998-2003	65
II. Perhitungan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman.....	66

ABSTRAKSI

1 Januari tahun 2001 merupakan awal diberlakukannya kebijakan Otonomi daerah, pemberian otonomi yang luas membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu setiap daerah dituntut agar dapat membiayai daerahnya sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut.

Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan daerah pada sebelum dengan sesudah kebijakan otonomi daerah di berlakukan di Kabupaten Sleman. Analisa yang di gunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu analisa yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat-kalimat dan analisa kualitatif, yaitu analisa dengan menggunakan rumus-rumus dan analisa pasti. Analisa kuantitatif yang digunakan meliputi analisa derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah), kebutuhan fiskal (*fiscal need*), kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), dan upaya fiskal (*tax effort*). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di Kabupaten Sleman : Derajat Desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) yang ditinjau dari prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan prosentase Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) menunjukkan bahwa pada masa sebelum otonomi daerah lebih tinggi dari pada sesudah otonomi daerah. Sedangkan apabila dilihat dari prosentase Sumbangan daerah (SB) terhadap Total penerimaan daerah (TPD) derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) pada masa sebelum otonomi daerah lebih rendah di bandingkan setelah otonomi daerah diberlakukan. Kebutuhan fiskal (*fiscal need*) sebelum otonomi daerah lebih rendah dari pada sesudah otonomi daerah diberlakukan. Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) sebelum kebijakan otonomi daerah lebih tinggi dari pada sesudah kebijakan otonomi daerah diberlakukan. Dan, upaya fiskal (*tax effort*) pada masa setelah kebijakan otonomi daerah diberlakukan lebih baik dari pada sebelum otonomi daerah.

Key word :

Otonomi daerah, Derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah), Kebutuhan fiskal (*fiscal need*), Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), Upaya fiskal (*tax effort*).

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang Masalah

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh sebagian masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan di daerah akhir-akhir ini, membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu unsur reformasi total tersebut adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah (pemerintah daerah), yang di kenal dengan kebijakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.

Alasan-alasan yang menyebabkan lahirnya tuntutan tersebut. Adalah, *pertama*, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Hal tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. *Kedua*, otonomi daerah merupakan jawaban untuk memasuki *era new game* yang

membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. Di era seperti ini, dimana *globalization cascade* sudah semakin meluas, pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan internasional, informasi, serta transaksi keuangan (Mardiasmo, 2002: 3-4).

MPR sebagai wakil-wakil rakyat menjawab tuntutan tersebut dengan menghasilkan beberapa ketetapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu ketetapan MPR yang dimaksud adalah Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada tanggal 15 Oktober 2004, disahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi atas Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara

dengan Daerah-Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Pada 15 Oktober 2004, disahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai revisi atas Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, saat ini kemampuan keuangan bebrapa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus agar dapat membiayai diri sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya. Khusus untuk merealisasikan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, maka pemerintah mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pengalihan pembiayaan atau desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003: 83). Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip tersebut berarti setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Ibid : 83).

Dalam desentralisasi fiskal, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting. Dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relations system*), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintahan.

Ada perbedaan sudut pandang di dalam menyikapi masalah dana perimbangan ini. Di satu sisi, adanya dana perimbangan dalam otonomi daerah merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas berjalannya proses otonomi daerah. Hal ini juga sebagai wujud bahwa walaupun sistem yang diterapkan adalah sistem otonomi daerah, akan tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di sisi yang lain, adanya dana perimbangan yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akan sampai pada kesimpulan akhir bahwa otonomi daerah tidak efektif untuk dilaksanakan. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir di semua daerah prosentase Pendapatan Asli Daerah, relatif lebih kecil, sekitar 25% dari total penerimaan daerah. Pada umumnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah

(Yani, 2002: 3). Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pusat.

Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa di antara 5 kabupaten yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kodya Yogyakarta, yang memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) paling besar dan hampir tiap tahunnya, adalah Kabupaten Sleman. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai patokan dalam pemilihan lokasi penelitian karena Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen terbesar dalam Dana Perimbangan, yaitu sekitar 75% dari total dana perimbangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut:

TABEL 1.1

**Data Proporsi Dana Perimbangan Terhadap Total Penerimaan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 1998-2003**

Tahun	Dana Perimbangan (dalam 000 rupiah)	Total penerimaan daerah (dalam 000 rupiah)	Proporsi dana perimbangan terhadap total penerimaan daerah (dalam %)
1998	83.899.900	116.343.632	72.11
1999	104.747.943	143.357.359	73.08
2000	104.264.022	153.705.551	67.83
2001	269.453.524	333.227.641	80.86
2002	299.961.255	415.658.056	72.17
2003	369.717.142	497.884.301	74.26

Sumber: *DIY Dalam Angka*, BPS Yogyakarta, berbagai edisi.

Oleh karena hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah Kabupaten Sleman, dalam skripsi yang berjudul **“Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman tahun 1998-2000 dan 2001-2003.”**

I.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu bagaimana perbandingan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah di kabupaten Sleman, yang meliputi :

1. Bagaimana perbandingan derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sleman?

2. Bagaimana perbandingan kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*) sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana perbandingan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sleman?
4. Bagaimana perbandingan upaya fiskal daerah (*tax effort*) sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sleman?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sleman yang meliputi :

1. Menganalisis perbandingan derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sleman.
2. Menganalisis perbandingan kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*) sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sleman.
3. Menganalisis perbandingan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sleman.
4. Menganalisis perbandingan upaya fiskal daerah (*tax effort*) sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sleman.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat:

1. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan daerah, yang meliputi derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah), kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*), kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*), dan upaya fiskal daerah (*tax effort*) sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah. Dari sini diperoleh bahan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi pembangunan di masa yang akan datang.

2. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti baik dalam hal penelitian maupun obyek penelitian, yang dalam hal ini adalah perbandingan kinerja keuangan daerah, yang meliputi derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah), kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*), kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*), dan upaya fiskal daerah (*tax effort*) sebelum kebijakan otonomi daerah dan sesudah kebijakan otonomi daerah, yang sangat erat kaitannya dengan kesiapan daerah secara fiskal dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah.

3. Bagi pihak lain

Memperkaya penelitian-penelitian sejenis yang telah ada yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian berikutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka pembahasan akan disusun dalam 7 bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan.

BAB II Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Sleman.

Bab ini berisi tentang gambaran umum keuangan daerah Kabupaten Sleman. Selain itu juga digambarkan mengenai letak geografisnya.

BAB III Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya, termasuk persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini.

BAB IV Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, seperti teori-teori tentang otonomi daerah dan desentralisasi, desentralisasi fiskal, dana perimbangan, dan kinerja keuangan daerah.

BAB V Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi lokasi penelitian, variabel penelitian, serta sumber dan jenis data. Metode yang digunakan adalah membandingkan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah diberlakukan melalui derajat otonomi fiskal, kapasitas fiskal, kebutuhan fiskal, dan posisi fiskal.

BAB VI Analisis Data

Bab ini berisi tentang analisis penelitian baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

BAB VII Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini disertai saran dari penulis.

BAB II

GAMBARAN KEUANGAN KABUPATEN SLEMAN

II.1. Keadaan Geografis

Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terbentang mulai $107^{\circ}15'03''$ sampai dengan $100^{\circ}29'30''$ Bujur Timur, dan mulai $7^{\circ}34'51''$ sampai dengan $7^{\circ}47'03''$ lintang Selatan. Dengan ketinggian antara 100-2.500 meter di atas permukaan air laut. Jarak terjauh Utara-Selatan kira-kira 32 km, Timur-Barat kira-kira 35 km, terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun. Berikut batasan-batasan wilayah kabupaten Sleman:

TABEL 2.1.

Batas Wilayah Kabupaten Sleman

Sebelah / Bagian	Berbatasan
Utara	Kabupaten Boyolali
Timur	Kabupaten Klaten
Barat Selatan	Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta

Sumber : *Sleman dalam Angka 2003*

II.2. Gambaran Keuangan Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah selalu diusahakan agar senantiasa selaras dengan roda pembangunan nasional. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah dapat mewujudkan otonomi daerah secara lebih merata. Kebutuhan dana untuk pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat membawa konsekuensi akan perlunya memanfaatkan lebih selektif terhadap sumber dana yang ada dan menggali serta mengelola sumber-sumber dana baru secara terus-menerus guna meningkatkan penerimaan daerah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah senantiasa dilakukan agar APBD dikelola secara efektif dan efisien guna mencapai sasaran pembangunan. Untuk itu diperlukan pengarah dan pengawasan agar pengeluaran pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan guna mencapai sasaran pembangunan. Dalam hal ini diperlukan adanya mekanisme penyelenggaraan yang efektif, tertib dan terkendali.

Dalam APBD, terdapat dua komponen penting, yaitu penerimaan dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah merupakan suatu modal dasar pembangunan daerah. Penerimaan daerah terdiri dari sisa lebih anggaran

tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), Sumbangan dan Bantuan, serta penerimaan pembangunan. Itu untuk sebelum pemberlakuan kebijakan otonomi daerah. Sedangkan untuk sesudah kebijakan otonomi daerah diberlakukan, penerimaan daerah terdiri dari sisa lebih anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan penerimaan pembangunan. Pada dasarnya keduanya sama saja, hanya pada penerimaan daerah sesudah kebijakan otonomi daerah diberlakukan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dimasukkan dalam Dana Perimbangan yang pada penerimaan daerah sebelum kebijakan otonomi daerah diberlakukan disebut Sumbangan dan Bantuan.

Sedangkan pada pengeluaran daerah, tidak terdapat perbedaan antara sebelum kebijakan otonomi daerah diberlakukan dengan sesudah kebijakan otonomi daerah diberlakukan. Pengeluaran daerah terdiri dari pengeluaran rutin (yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, angsuran pinjaman/hutang, ganjaran subsidi dan sumbangan kepada daerah bawahan, pensiun/bantuan dan understand, pengeluaran lain-lain, dan pengeluaran tak terduga) dan pengeluaran pembangunan (yang meliputi bidang ekonomi, bidang sosial, bidang umum, subsidi pembangunan kepada daerah bawahan, pembayaran kembali pinjaman, dan belanja pembangunan lain-lain).

Dalam tabel di bawah ini digambarkan penerimaan dan pengeluaran Kabupaten Sleman.

TABEL 2.2

**Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2003
Dalam 000 rupiah**

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Surplus
1998/1999	116.343.632	111.980.069	4.363.563
1999/2000	143.357.359	137.472.648	5.884.711
2000	153.705.551	144.199.906	39.505.645
2001	333.227.641	313.406.363	19.821.278
2002	415.658.056	370.649.657	45.008.399
2003	497.884.301	429.845.582	68.038.719

Sumber : *DIY Dalam Angka*, BPS Yogyakarta, berbagai edisi.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa, penerimaan daerah dari tahun anggaran yang satu ke tahun anggaran berikutnya selalu mengalami kenaikan. Begitu juga dengan pengeluaran daerahnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan daerah juga diimbangi dengan naiknya pengeluaran daerah pada tiap tahun anggarannya. Hal lain yang masih dapat dilihat dari tabel di atas adalah bahwa tiap tahun anggaran mengalami surplus, di mana hal ini juga berarti jumlah penerimaan daerah selalu lebih besar dari pengeluaran daerahnya. Jumlah surplus anggaran terbesar diperoleh pada tahun anggaran 2003, yaitu mencapai 68.038.719.000, sedangkan surplus terkecil diperoleh pada tahun anggaran 1998/1999 yaitu 4.363.563.000.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

III.1. Penelitian Sudono Susanto

Penelitian ini berjudul "*Analisis Perkembangan Pembiayaan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah (studi kasus Daerah Tingkat II Banjarnegara)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat otonomi fiskal (DOF) di Daerah Tingkat II Banjarnegara yang diukur dengan variabel tingkat perkembangan ekonomi (TPE) dan bantuan pemerintah pusat (G). Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat perkembangan ekonomi (TPE) dan bantuan pemerintah pusat (G) berpengaruh negatif terhadap derajat otonomi fiskal daerah (DOF).

3.2. Penelitian Yuliati

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliati (Halim, 2004: 21) yang berjudul "*Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah (Kasus Kabupaten Malang)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis derajat otonomi Kabupaten Malang yang ditekankan kepada derajat desentralisasi, bantuan serta kapasitas fiskal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketergantungan pemerintah Kabupaten Malang terhadap pemerintah pusat pada tahun anggaran 1995/1996-1999/2000 masih sangat tinggi, yang dibuktikan dengan masih rendahnya rata-rata proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total

Penerimaan Daerah (TPD) selama kurun waktu 5 tahun, yaitu hanya sebesar 15%, walaupun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Rata-rata proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) selama kurun waktu 5 tahun hanya sebesar 29% saja. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat terhadap keuangan daerah Kabupaten Malang selama kurun waktu 5 tahun tersebut masih sangat besar yang juga ditunjukkan dengan tingginya rata-rata proporsi pemerintah pusat terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), yaitu sebesar 71%. Kabupaten Malang memiliki kapasitas fiskal yang relatif baik dibandingkan dengan standar fiskal rata-rata kabupaten/kota se-Jawa Timur. Namun apabila dibandingkan dengan kebutuhan fiskalnya maka terdapat kekurangan (gap) sebesar 12%. Jadi, untuk menutupi kekurangan tersebut memang masih diperlukan dana dari pemerintah pusat.

3.3. Penelitian Jasagung Hariyadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Jasagung Hariyadi (Halim, 2004: 339) yang berjudul "*Estimasi Penerimaan dan Belanja Daerah serta Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Belitung: Studi Kasus Tahun Anggaran 2001.*" Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui estimasi penerimaan daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah melalui pengukuran derajat desentralisasi fiskal untuk tahun 2001, sehingga terlihat kemampuan Kabupaten Belitung dalam rangka melaksanakan otonomi

daerah yang mulai berlaku efektif pada tahun 2001. Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan estimasi APBD Kabupaten Belitung tahun anggaran 2001 perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) adalah sebesar 11,61%. Sedangkan perbandingan antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) adalah sebesar 7,18% dan Sumbangan Daerah dan Total Penerimaan Daerah (TPD) adalah sebesar 81,21%.

3.4. Penelitian Kifliansyah

Penelitian yang dilakukan oleh Kifliansyah (Halim, 2004: 329) yang berjudul "*Analisa Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Kasus Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*." Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah pada tahun anggaran 1999/2000. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 3,21%, proporsi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 18,80%, proporsi Sumbangan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 76,61%. Dengan kondisi ini ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat besar.

3.5. Lilies Setiarti

Penelitian yang dilakukan oleh Lilies Setiarti (jurnal, 2002: 141-152) yang berjudul "*Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Kabupaten Bantul Yogyakarta)*". Tujuan dari penelitian ini adalah Mengukur serta menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan kebijakan otonomi daerah dan Mengetahui peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Struktur Penerimaan APBD Kabupaten Bantul. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, *Pertama*, berdasarkan kesiapan pemerintah kabupaten bantul dari sisi keuangan daerah dapat disimpulkan

- Derajat Desentralisasi Fiskal yang dihitung atas dasar rasio antara PAD terhadap TPD, rasio BHPBP terhadap TPD, rasio SB terhadap TPD, menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat.
- Bila dilihat dari kemampuan PAD dalam mendanai belanja PEMDA masih mengindikasikan adanya ketergantungan dari pemerintah pusat.
- Kabupaten Bantul memiliki kapasitas fiskal yang sama besar, sehingga tidak perlu menutup dengan bantuan pemerintah pusat.
- Posisi fiskal yang dihitung dengan rata-rata perubahan PAD terhadap rata-rata perubahan PDRB, menunjukkan hasil yang berbeda berdasarkan atas PDRB harga konstan dengan PDRB atas

harga berlaku. Namun demikian sumbangan PDRB terhadap PAD sangat strategis peranannya.

Kedua, berdasarkan kesiapan pemerintah dari segi kemampuan keuangan daerah masih kurang (terutama aspek desentralisasi fiskal) sehingga perlu diupayakan peningkatan PAD baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi.

Penelitian 1 menggunakan alat analisis regresi untuk mengukur derajat Otonomi Fiskal (tingkat kemandirian daerah) dengan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) sebagai variabel dependen dan tingkat perkembangan ekonomi (TPE) dan bantuan pemerintah pusat (G) sebagai variabel independen, akan tetapi dengan lokasi penelitian yang berbeda-beda.

Penelitian 2, 3, 4, dan 5 sama-sama mengukur tingkat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) dengan cara membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), dan Sumbangan Daerah (SB) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Khusus pada penelitian 2 dilengkapi dengan analisis kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal. Setiap penelitian memiliki lokasi penelitian yang berbeda-beda.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membandingkan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah di Daerah kabupaten Sleman. Pada penelitian ke 6, alat analisis yang

digunakan sama, akan tetapi dengan lokasi yang berbeda. Yang dianalisis tidak hanya derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) saja, akan tetapi secara keseluruhan meliputi:

- a. Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu :

$$\text{Rumus 1} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}}$$

$$\text{Rumus 2} = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}}$$

$$\text{Rumus 3} = \frac{\text{Sumbangan Daerah (SB)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}}$$

dimana :

SB adalah Sumbangan Daerah yang diperoleh dari DAK (Dana Alokasi Khusus) ditambah DAU (Dana Alokasi Umum).

$$\text{SB} = \text{DAK} + \text{DAU}$$

TPD adalah Total Penerimaan Daerah yang diperoleh dari penjumlahan PAD, BHPBP, dan SB.

$$\text{TPD} = \text{PAD} + \text{BHPBP} + \text{SB}$$

- b. Kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan menghitung indeks pelayanan publik per kepala (IPPP) dengan formula:

$$IPPP = \frac{\text{Pengeluaran aktual per kapita untuk jasa publik (PPP)}}{\text{Standar kebutuhan fiskal daerah (SKF)}}$$

PPP = jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan per kapita masing-masing daerah.

$$SKF = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Daerah / Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah kabupaten}}$$

c. Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dengan formula :

$$FC = \frac{\text{PDRB / Jumlah Penduduk}}{\text{Kapasitas Fiskal Standar (KFs)}} \times 100 \%$$

$$KFs = \frac{\text{Jumlah PDRB / Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah kabupaten}}$$

d. Upaya fiskal (*tax effort*) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$e = \frac{\Delta \text{ PAD}}{\Delta \text{ PDRB}}$$

dimana e adalah elastisitas dan Δ adalah perubahan.

BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1. Definisi Otonomi Daerah

1. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5.

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (Undang-Undang Otonomi Daerah 2004: 4).

2. Menurut kamus *Webster's Third New International Dictionary*

Kata *autonomy* berasal dari bahasa Yunani (Greek), yakni dari kata *autonomia*, yang artinya :

The quality or state being independent, free, and self directing. Atau The degree of self determination or political control possessed by a minority group, territorial division or political unit in its relations to the state or political community of which it forms a part and extending from local to full independence.

(Saragih, 2003: 39 dan 40).

3. Menurut *Encyclopedia of Social Science*

Dalam pengertiannya yang orisinal, otonomi adalah *The legal self sufficiency of social body and its actual independence* (Yani, 2002: 5).

4. Menurut *Black's Law Dictionary*

Definisikan *autonomy* adalah *The political independence of a nation, the right (and condition) of power of self government. The negation of a state of political influence from without or from foreign powers* (Ibid: 5).

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip tersebut berarti setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Saragih, Op cit: 83). Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah. Artinya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah.

4.2. Definisi desentralisasi

Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU No 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8,

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
(Undang-Undang Otonomi Daerah 2004: 4 dan 220)

4.3. Definisi desentralisasi fiskal

Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, Op cit: 83)

4.4. Sumber pendapatan daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 157.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 1. hasil pajak daerah
 2. hasil retribusi daerah
 3. hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan
 4. lain-lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Undang-Undang Otonomi Daerah 2004:103-104)

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No 33 Pasal 1 ayat 18,

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.”

(Ibid : 221)

2. Dana Perimbangan

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 19, 20, 21, dan 23, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.“

Dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana bagi hasil terdiri dari:

- a. Bagi hasil pajak, yang meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 .

- b. Bagi hasil sumber daya alam, yang meliputi sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan panas bumi.
2. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 3. Dana Alokasi Khusus (DAK), selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Ibid : 221-222).
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 164 ayat 1,

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah (Ibid : 107).

4.5. Prosentase Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP)

1. Bagi hasil pajak

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian:

1. 16,2% untuk daerah propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi.
2. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota, dan
3. 9% untuk biaya pemungutan.

10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realitas penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:

1. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota, dan
2. 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

b. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan (BPHTB) adalah 80% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. 16% untuk daerah propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi, dan
2. 64% untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/kota.

20% bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

c. Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh pasal 21.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 adalah 20% dengan rincian:

1. 60% untuk kabupaten/kota
2. 40% untuk propinsi.

Sedangkan yang diterima pemerintah pusat sebesar 80%.

2. Bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)

a. Kehutanan

1. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk daerah adalah 80% dengan rincian:

- a. 16% untuk propinsi
- b. 64% untuk kabupaten/kota penghasil

Sedangkan yang diterima oleh pemerintah pusat adalah 20%.

2. Dana reboisasi

Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi adalah 40% untuk daerah dengan rincian:

- a. 16% untuk propinsi yang bersangkutan
- b. 32% untuk kabupaten/kota penghasil
- c. 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan

Sedangkan yang diterima oleh pemerintah pusat adalah 60%

b. Pertambangan Umum

1. Iuran Tetap (*Land-rend*)

Penerimaan Iuran Tetap untuk daerah adalah 80% dengan rincian:

- a. 16% untuk propinsi yang bersangkutan
- b. 64% untuk kabupaten/kota penghasil

Sedangkan yang diterima oleh pemerintah pusat adalah 20%.

2. Iuran Eksplorasi dan Iuran eksploitasi (*Royalty*)

Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalty*) untuk daerah adalah 80% dengan rincian:

- a. 16% untuk propinsi yang bersangkutan
- b. 32% untuk kabupaten/kota penghasil
- c. 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan

Sedangkan yang diterima pemerintah pusat adalah 20%.

c. Perikanan

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbalan:

- a. 20% untuk pemerintah pusat
 - b. 80% untuk pemerintah daerah
- d. Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi dengan komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbalan:

1. 84,5% untuk pemerintah pusat
 2. 15,5% untuk daerah, dengan rincian:
 - a. 3% untuk propinsi yang bersangkutan
 - b. 6% untuk kabupaten/kota penghasil
 - c. 6% dibagikan untuk kabupaten/kota lain dalam propinsi yang bersangkutan
 - d. 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.
- e. Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi dengan komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbalan:

1. 69.5% untuk pemerintah pusat
2. 30.5% untuk daerah, dengan rincian:
 - a. 6% untuk propinsi yang bersangkutan
 - b. 12% untuk kabupaten/kota penghasil
 - c. 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan
 - d. 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar

f. Pertambangan panas bumi

Penerimaan pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi dengan komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbalan:

1. 20% untuk pemerintah pusat
2. 80% untuk daerah, dengan rincian:
 - a. 16% untuk propinsi yang bersangkutan
 - b. 32% untuk kabupaten/kota penghasil
 - c. 32% dibagikan untuk kabupaten/kota dalam propinsi yang bersangkutan

4.6. Kinerja keuangan daerah

Kinerja atau kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2004: 24).

Untuk melihat kinerja keuangan daerah, dapat dilakukan dengan menganalisis

- a. Derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah)
- b. Kebutuhan Fiskal (*fiscal need*)
- c. Kapasitas Fiskal (*fiscal capacity*)
- d. Upaya fiskal (*tax effort*)

4.6.1. Derajat desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat (Ibid: 27)

4.6.2. Kebutuhan fiskal

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1,

“Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. “(Undang–Undang Otonomi Daerah 2004: 236).

4.6.3. Kapasitas fiskal

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 3, “Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil.” (Ibid: 236).

4.6.4. Upaya Fiskal

Upaya fiskal adalah koefisien elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

4.6.5. Kebutuhan Fiskal Standar (SKF)

Kebutuhan fiskal standar adalah rata-rata kebutuhan fiskal standar suatu daerah (Halim, 2004: 29)

4.6.6. Kapasitas Fiskal Standar (KFs)

Kapasitas Fiskal Standar (KFs) adalah rata-rata kapasitas fiskal standar suatu daerah (Ibid: 29)

4.6.7. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin kuat pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya). Semakin rendah Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin lemah pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandiriannya).

4.6.8. Semakin tinggi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), semakin kuat pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya).

Semakin rendah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (PHPBP), maka semakin lemah derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya).

- 4.6.9. Semakin tinggi Sumbangan Daerah (SB) maka semakin lemah derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya). Semakin rendah Sumbangan Daerah (SB) maka semakin kuat derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandiriannya).
- 4.6.10. Semakin tinggi Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP), maka semakin besar pula kebutuhan fiskal (*fiscal need*). Semakin rendah Indeks Pelayanan Publik (IPPP), semakin sedikit pula kebutuhan fiskal (*fiscal need*)
- 4.6.11. Semakin elastis Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, maka struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut semakin baik. Semakin inelastis Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, maka struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut semakin buruk.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa di antara 5 kabupaten yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diantaranya Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kodya Yogyakarta, Kabupaten Sleman memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) paling besar hampir tiap tahunnya. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai patokan dalam pemilihan lokasi penelitian karena Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen terbesar dalam Dana Perimbangan, yaitu sekitar 75% dari total dana perimbangan.

5.2. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) ini ditetapkan sepenuhnya oleh daerah (Yani, 2002: 110)

3. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksudkan sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat dipastikan tiap tahunnya (Ibid: 126)
4. Bagian daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (*Revenue sharing*), adalah bagian daerah dari pemerintah pusat yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak (sumber daya alam), untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pusat dan daerah. Bagi hasil pajak meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan bagi hasil Sumber Daya Alam terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan (Ibid: 41).

5. Pengeluaran pemerintah pusat, adalah total biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
6. Pengeluaran pemerintah daerah, adalah total biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), adalah seluruh unit usaha daerah.
8. Jumlah Kabupaten
9. Jumlah penduduk

5.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah ada, baik di buku literatur maupun dari sumber-sumber lain. Data sekunder tersebut dalam bentuk laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Kabupaten Sleman tahun 1998-2003, data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 1998-2003, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Kabupaten Sleman tahun 1998-2003, jumlah penduduk, jumlah kabupaten yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

5.4. Metode Analisa Data

1. Analisa deskriptif

Metode analisa kualitatif didasarkan pada analisa variabel-variabel yang mendukung analisa tersebut, yang tidak dapat diukur secara nyata, tapi menggunakan analisa yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat-kalimat.

2. Analisa kuantitatif

Analisa kuantitatif didasarkan pada analisa variabel-variabel yang dapat dijelaskan secara kuantitas (dapat diukur) dengan rumus-rumus atau alat analisa pasti. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kinerja keuangan daerah yang dikonsepsi oleh Hikmah

(Halim, 2004: 24) yang meliputi :

- a. Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu :

$$\text{Rumus 1} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}}$$

$$\text{Rumus 2} = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}}$$

$$\text{Rumus 3} = \frac{\text{Sumbangan Daerah (SB)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}}$$

dimana :

SB adalah Sumbangan Daerah yang diperoleh dari DAK (Dana Alokasi Khusus) ditambah DAU (Dana Alokasi Umum).

$$SB = DAK + DAU$$

TPD adalah Total Penerimaan Daerah yang diperoleh dari penjumlahan PAD, BHPBP, dan SB.

Dengan $TPD = PAD + BHPBP + SB$, jika hasil perhitungan meningkat maka derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian) suatu daerah semakin menguat.

- b. Kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan menghitung indeks pelayanan publik per kapita (IPPP) dengan formula:

$$IPPP = \frac{\text{Pengeluaran aktual per kapita untuk jasa publik (PPP)}}{\text{Standar kebutuhan fiskal daerah (SKF)}}$$

PPP = jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan per kapita masing-masing daerah.

$$SKF = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Daerah / Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kabupaten}}$$

Semakin tinggi rata-rata indek pelayanan publik perkapita (IPPP), maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar.

c. Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dengan formula :

$$FC = \frac{\text{PDRB} / \text{Jumlah Penduduk}}{\text{Kapasitas Fiskal Standar (KFs)}} \times 100 \%$$

$$KFs = \frac{\text{Jumlah PDRB} / \text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kabupaten}}$$

Semakin tinggi rata-rata kapasitas fiskal (FC) suatu daerah maka kemampuan daerah dalam mendanai kebutuhannya semakin memadai.

d. Upaya fiskal (*tax effort*) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$e = \frac{\Delta \text{PAD}}{\Delta \text{PDRB}}$$

dimana e adalah elastisitas dan Δ adalah perubahan.

Semakin elastis PAD suatu daerah yang dipengaruhi oleh naiknya PDRB suatu daerah, maka struktur PAD di suatu daerah semakin membaik.

BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui kesiapan pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dalam bidang keuangan daerah, dalam penelitian ini digunakan analisis kinerja keuangan daerah yang dapat dikelompokkan menjadi :

1. Derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah)
2. Kebutuhan fiskal (*fiscal need*)
3. Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*)
4. Upaya fiskal (*tax effort*)

Dengan analisis tersebut, kemudian dilakukan perbandingan antara dua periode waktu, yaitu :

1. Sebelum otonomi daerah (1998-2000)
2. Sesudah otonomi daerah (2001-2003)

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah)

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) dapat digunakan 3 cara, yaitu :

1. Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD)

2. Prosentase Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Penrimaan Daerah (TPD)
3. Prosentase Sumbangan Daerah (SB) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD)

Dimana, $SB = \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} + \text{Dana Alokasi Khusus (DAK)}$

$$TPD = PAD + BHPBP + SB$$

Hasil perhitungan dari ketiganya dapat diuraikan dan dianalisis sebagai berikut:

1. Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD)

Hasil perhitungan Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 6.1

**Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD)
Tahun 1998-2003**

Tahun	Prosentase PAD thd TPD (%)	Rata-rata (%)	Keterangan
1998/1999	14,983	14,560	Sebelum otonomi daerah
1999/2000	14,052		
2000	14,645		
2001	11,547	12,315	Sesudah otonomi daerah
2002	12,075		
2003	13,323		

Sumber : *DIY dalam Angka*, BPS DIY (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada masa sebelum otonomi daerah, yaitu pada tahun anggaran 1998/1999 sampai 2000, rata-rata prosentase PAD terhadap TPD sebesar 14,560% per tahun anggaran. Sedangkan pada masa sesudah otonomi daerah, yaitu pada tahun anggaran 2001 sampai 2003, rata-rata prosentase PAD terhadap TPD mengalami penurunan menjadi 12,315% per tahun anggaran.

Keadaan tersebut dikarenakan pada masa sesudah otonomi daerah kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun anggaran ke tahun anggaran berikutnya besarnya tidak sebanding dengan kenaikan Sumbangan daerah (SB) dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP). Atau dengan kata lain kenaikan Sumbangan daerah (SB) dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) secara angka lebih besar dibandingkan dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga secara otomatis prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah hasilnya kecil.

Jadi dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) yang dilihat dari prosentase PAD terhadap TPD pada masa sesudah otonomi daerah, tingkat desentralisasi fiskalnya melemah. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa sesudah otonomi daerah, pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat.

2. Prosentase Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD)

Hasil perhitungan prosentase Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 6.2

Prosentase Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) Terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) Tahun 1998-2003

Tahun	Prosentase BHPBP thd TPD (%)	Rata-rata (%)	Keterangan
1998/1999	7,901	8,550	Sebelum otonomi daerah
1999/2000	8,493		
2000	9,256		
2001	8,237	8,093	Sesudah otonomi daerah
2002	8,679		
2003	7,363		

Sumber : *DIY dalam Angka*, BPS DIY (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa prosentase BHPBP terhadap TPD pada masa sebelum otonomi daerah, yaitu pada tahun anggaran 1998/1999 sampai 2000 lebih besar jika dibandingkan pada masa sesudah otonomi daerah, yaitu tahun anggaran 2001 sampai 2003. Hal tersebut ditunjukkan dari rata-rata prosentase BHPBP terhadap TPD pada masa sebelum otonomi daerah mencapai 8,550%, sedangkan pada masa sesudah otonomi daerah yang hanya mencapai 8,093%. Apabila dilihat dari angka prosentase BHPBP terhadap TPD dari tahun anggaran ke tahun anggaran, pada masa sebelum otonomi daerah selalu mengalami kenaikan. Namun

pada masa sesudah otonomi daerah, pada tahun anggaran 2001, proporsi BHPBP terhadap TPD mengalami sedikit penurunan dibandingkan 2 tahun anggaran sebelumnya, yaitu tahun anggaran 1999/2000 dan 2000, yang termasuk pada masa sebelum otonomi daerah. Akan tetapi pada masa tahun anggaran berikutnya kembali mengalami kenaikan.

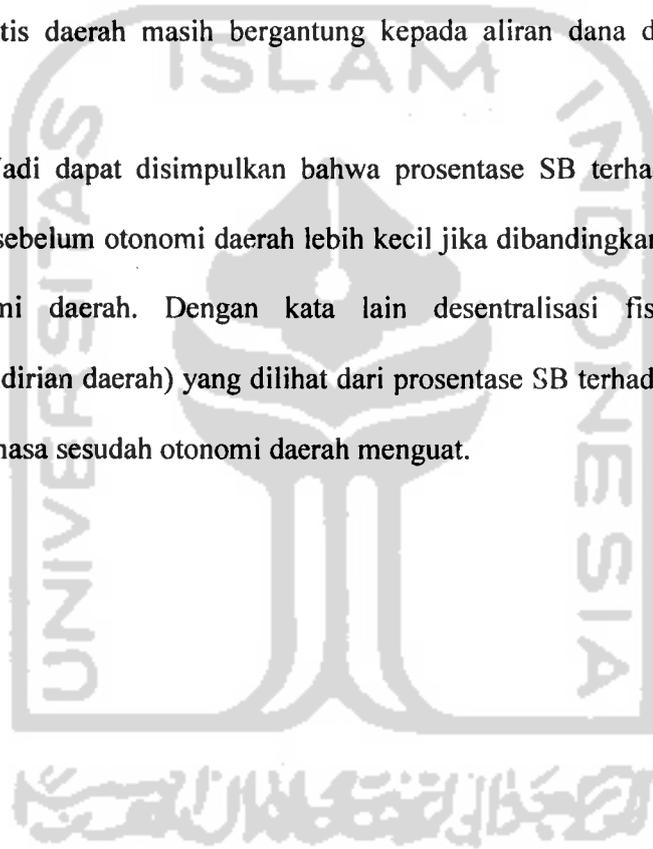
Hal tersebut diatas disebabkan karena tidak adanya sumber daya alam di Kabupaten Sleman yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah. Padahal penerimaan daerah melalui Bagi Hasil Bukan Pajak untuk daerah yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) yang dilihat dari prosentase BHPBP terhadap TPD pada masa sebelum otonomi daerah lebih besar dibandingkan pada masa sesudah otonomi daerah. Dengan kata lain bahwa desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian) pada masa sesudah otonomi daerah melemah.

tetapi pada 2 tahun anggaran berikutnya, yaitu tahun anggaran 2002 dan 2003 mengalami penurunan kembali.

Hal tersebut diatas disebabkan karena kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum atau pelayanan publik Kabupaten Sleman mengalami kenaikan hampir pada tiap tahunnya, yang tidak diikuti dengan kenaikan kapasitas fiskalnya. Sehingga secara otomatis daerah masih bergantung kepada aliran dana dari pemerintah pusat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa prosentase SB terhadap TPD pada masa sebelum otonomi daerah lebih kecil jika dibandingkan masa sesudah otonomi daerah. Dengan kata lain desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) yang dilihat dari prosentase SB terhadap TPD bahwa pada masa sesudah otonomi daerah menguat.



2. Kebutuhan fiskal (*fiscal need*)

Hasil perhitungan kebutuhan fiskal dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 6.4
Kebutuhan Fiskal
Tahun 1998-2003

Tahun	Kebutuhan Fiskal (%)	Rata-rata (%)	Keterangan
1998/1999	2,830	2,553	Sebelum otonomi daerah
1999/2000	2,660		
2000	2,170		
2001	3,060	2,951	Sesudah otonomi daerah
2002	2,746		
2003	3,047		

Sumber : *DIY dalam Angka*, BPS DIY (data diolah),

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan fiskal pada masa sebelum otonomi daerah, yaitu pada tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan 2000, dilihat dari rata-ratanya hanya mencapai 2,553%. Jika dibandingkan kebutuhan fiskal pada masa sesudah otonomi daerah, yaitu pada tahun anggaran 2001 sampai 2003, dilihat dari rata-ratanya mencapai 2,951%.

Hal tersebut diatas dapat dijelaskan karena banyak wewenang-wewenang dan kebutuhan daerah yang pada masa sebelum otonomi daerah selalu "*di-handle*" oleh pemerintah pusat, pada masa sesudah otonomi daerah mau tidak mau, daerah harus mampu menangani dan mencukupi daerahnya sendiri. Pada masa sesudah otonomi daerah, daerah tidak dapat menggantungkan diri dari bantuan pemerintah pusat dalam mencukupi

kebutuhan dan pengeluaran daerahnya. Jadi secara logika kebutuhan daerah akan semakin meningkat.

Kesimpulannya, kebutuhan fiskal pada masa sebelum otonomi daerah lebih kecil dibandingkan pada masa sesudah otonomi daerah.

3. Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*)

Hasil perhitungan kapasitas fiskal dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 6.5
Prosentase Kapasitas Fiskal
Tahun 1998-2003

Tahun	Kapasitas Fiskal (%)	Rata-rata (%)	Keterangan
1998/1999	5,336		Sebelum otonomi daerah
1999/2000	5,068	5,137	
2000	5,007		
2001	5,002		Sesudah otonomi daerah
2002	5,019	4,997	
2003	4,970		

Sumber : *DIY dalam Angka*, BPS DIY (data diolah),

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kapasitas fiskal pada masa sebelum otonomi daerah, yaitu pada tahun anggaran 1998/1999 sampai 2000, mencapai 5,137%, lebih besar dibandingkan kapasitas fiskal pada masa sesudah otonomi daerah, yaitu pada tahun anggaran 2001 sampai 2003, yang hanya mencapai 4,997%.

Hal tersebut dapat dijelaskan karena daerah belum siap dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Selain itu, daerah belum menggali sumber-sumber keungan daerah yang ada secara maksimal, sehingga daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan daerahnya yang selalu naik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kapasitas fiskal pada masa sebelum otonomi daerah lebih besar dari pada masa sesudah otonomi daerah.

4. Upaya fiskal (*tax effort*)

Hasil perhitungan Upaya fiskal (*tax effort*) dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

TABEL 6.6

Perhitungan Upaya fiskal sebelum otonomi daerah

Tahun	PAD (000)	Pertum PAD (%)	PDRB Harga Konstan (000000)	Pertum PDRB Harga Konstan (%)	PDRB Harga Berlaku (000000)	Pertum PDRB Harga Berlaku (%)
1998/1999	14.786.413		1.337.233		2.688.105	
1999/2000	17.125.445	15,818	1.404.658	1,991	3.175.312	18,124
2000	17.889.885	4,463	1.451.772	3,350	3.560.985	12,145
	Rata-rata	10,140	Rata-rata	2,670	Rata-rata	15,134

Sumber : *DIY dalam Angka*, BPS DIY (data diolah),

$$\text{Elastisitas PAD terhadap PDRB Harga Konstan} = \frac{10.140}{2.670} = 3,798$$

$$\text{Elastisitas PAD terhadap PDRB Harga Berlaku} = \frac{10.140}{15,134} = 0,670$$

TABEL 6.7

Perhitungan Upaya fiskal sesudah otonomi daerah.

Tahun	PAD (000)	Pertumb. PAD (%)	PDRB Harga Konstan (000000)	Pertumb. PDRB Harga Konstan (%)	PDRB Harga Berlaku (000000)	Pertumb. PDRB Harga Berlaku
2001	29.571.153		1.509.835		4.119.788	
2002	38.908.193	31,574	1.578.866	4,572	4.874.054	18,308
2003	52.978.731	36,163	1.649.080	4,447	5.456.414	21,138
	Rata-rata	33,868	Rata-rata	4,509	Rata-rata	19,723

Sumber : *DIY dalam Angka*, BPS DIY (data diolah),

$$\text{Elastisitas PAD terhadap PDRB Harga Konstan} = \frac{33.868}{4.509} = 7.511$$

$$\text{Elastisitas PAD terhadap PDRB Harga Berlaku} = \frac{33.868}{19.723} = 1.717$$

Dari hasil perhitungan di atas, pada masa sebelum otonomi daerah, dengan menggunakan PDBR Harga Konstan, laju pertumbuhan PDRB Harga Konstan, laju pertumbuhan PDRB sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD, yaitu apabila PDRB naik sebesar 1% maka PAD akan meningkat sebesar 3,798%. Akan tetapi, jika menggunakan PDRB Harga Berlaku, apabila PDRB naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar

0,670%, PDRB mempunyai pengaruh yang lebih kecil terhadap peningkatan PAD.

Sedangkan pada masa sesudah otonomi daerah, dengan menggunakan PDRB Harga Konstan, laju pertumbuhan PDRB sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD, walaupun secara angka lebih besar dibandingkan pada masa sebelum otonomi daerah, yaitu apabila PDRB naik sebesar 1% maka PAD akan meningkat sebesar 7,511%. Akan tetapi, jika menggunakan PDRB Harga Berlaku, apabila PDRB naik sebesar 1% maka PAD akan naik sebesar 1,717%. PDRB mempunyai pengaruh lebih besar terhadap peningkatan PAD, dan secara angka pengaruh ini lebih besar dibandingkan dengan masa sebelum otonomi daerah.

Karena setiap kenaikan PDRB 1%, baik PDRB Harga Konstan maupun harga Berlaku, pada masa sebelum otonomi daerah selalu berpengaruh terhadap peningkatan PAD yang lebih kecil dibandingkan masa sesudah otonomi daerah, maka upaya fiskal (*tax effort*) pada masa sesudah otonomi daerah lebih elastis dibandingkan masa sebelum otonomi daerah, hal ini menunjukkan bahwa struktur PAD pada masa setelah otonomi daerah lebih baik dibandingkan pada masa sebelum otonomi daerah.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbandingan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah di Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam uraian dibawah ini :

1. Desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah), apabila ditinjau dari :
 - a. Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), pada masa sebelum otonomi daerah, yaitu pada tahun anggaran 1998/1999 sampai 2000, lebih besar dibandingkan dengan pada masa sesudah otonomi daerah, yaitu pada tahun anggaran 2001 sampai 2003. Jadi desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) yang dilihat dari prosentase PAD terhadap TPD pada masa sesudah otonomi daerah melemah.
 - b. Prosentase Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) pada masa sebelum otonomi daerah lebih kecil dari pada masa sesudah otonomi daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) yang dilihat dari prosentase BHPBP terhadap TPD pada masa sesudah otonomi daerah melemah.
 - c. Prosentase Sumbangan Daerah (SB) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) pada masa sebelum otonomi daerah lebih kecil dibandingkan

pada masa sesudah otonomi daerah. Dengan kata lain desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian fiskal daerah) yang dilihat dari prosentase Sumbangan Daerah (SB) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), pada masa sesudah otonomi daerah menguat..

2. Kebutuhan fiskal (*fiscal need*) pada masa sebelum otonomi daerah lebih rendah dibandingkan pada masa sesudah otonomi daerah.
3. Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) pada masa sebelum otonomi daerah lebih tinggi dibanding pada masa sesudah otonomi daerah.
4. Upaya fiskal (*tax effort*) pada masa setelah otonomi daerah lebih baik dibandingkan pada masa sebelum otonomi daerah.

6.2. Saran – saran

Karena sektor pajak belum menjadi sektor yang diprioritaskan dalam upaya peningkatan PAD, sehingga sektor pajak belum tergali dan terkelola secara optimal, maka perlu diupayakan peningkatan PAD baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Secara ekstensifikasi, pemerintah daerah seharusnya dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang – peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari.

Secara intensifikasi yaitu dengan cara memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak, antara lain :

1. Pendataan kembali wajib pajak dan objek pajak yang sudah ada dalam rangka penggalian potensi daerah.
2. Melakukan perhitungan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak, sehingga biaya pemungutan dapat diperhitungkan sebelumnya.
3. Meningkatkan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan, sehingga kebocoran dapat dikurangi.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka*, berbagai edisi, Yogyakarta.
- _____, *Statistik Indonesia*, berbagai edisi, Yogyakarta.
- Halim, Abdul (2004), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, UPP UMP YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Saragih, Juli Panglima (2003), *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setiarti, L. (2002), "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah : studi di kabupaten Bantul Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume III, No. 2, 141-152.
- Shah, Anwar (1994), " Intergovernmental Fiscal Relation in Indonesia ". *World Bank Discussion Paper No 239*. The World Bank Washington DC, dari www.worldbank.org.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (1999), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Susanto, Sudono (2001), " Analisa Perimbangan Pembiayaan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah Studi kasus Kabupaten Banjarnegara ", *Skripsi Sarjana* (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Undang – Undang Otonomi Daerah 2004, Penerbit Absolut.
- Yani, Ahmad (2002), *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

LAMPIRAN I
DATA PENELITIAN

Tabel 1 digunakan untuk menghitung derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) dan upaya fiskal (*tax effort*) Kabupaten Sleman.

TABEL 1

**Data Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Sleman Tahun 1998 – 2003 dalam 000 rupiah**

Tahun	PAD
1998/1999	14.786.413
1999/2000	17.125.445
2000	17.889.885
2001	29.571.153
2002	38.908.193
2003	52.978.731

Sumber : *Sleman Dalam Angka*, BPS DIY, berbagai edisi.

Tabel 2, 3, dan 4 digunakan untuk menghitung derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) Kabupaten Sleman.

TABEL 2

**Data Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP)
Kabupaten Sleman Tahun 1998 – 2003 dalam 000 rupiah**

Tahun	BHP	BHBP	BHP+BHBP
1998/1999	7.578.314	218.948	7.797.262
1999/2000	10.031.831	318.855	10.350.716
2000	11.045.686	260.689	11.306.375
2001	21.018.917	76.051	21.094.967
2002	27.629.185	336.372	27.965.557
2003	28.932.162	345.870	29.278.032

Sumber : *Sleman Dalam Angka*, BPS DIY, berbagai edisi.

TABEL 3

**Data Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten Sleman Tahun 1998 – 2003 dalam 000 rupiah**

Tahun	DAU
1998/1999	61.021.580
1999/2000	78.219.325
2000	70.375.140
2001	205.430.376
2002	255.350.000
2003	304.780.000

Sumber : *Sleman Dalam Angka*, BPS DIY, berbagai edisi.

TABEL 4

**Data Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten Sleman Tahun 1998 – 2003 dalam 000 rupiah**

Tahun	DAK
1998/1999	15.081.058
1999/2000	16.177.932
2000	22.582.507
2001	0
2002	0
2003	10.600.000

Sumber : *Sleman Dalam Angka*, BPS DIY, berbagai edisi.

Tabel 5 dan 6 digunakan untuk menghitung kebutuhan fiskal (*fiscal need*) Kabupaten Sleman.

TABEL 5

**Data Pengeluaran Pemerintah
Kabupaten Sleman Tahun 1998 – 2003 dalam 000 rupiah**

Tahun	Pengeluaran rutin	Pengeluaran pembangunan	Total
1998/1999	72.023.506	22.771.472	94.794.978
1999/2000	93.351.028	27.001.264	120.352.292
2000	88.779.126	29.753.847	118.532.973
2001	255.059.193	38.170.723	293.229.916
2002	298.456.491	39.637.566	338.094.057
2003	138.450.042	309.060.518	447.510.560

Sumber : *Sleman Dalam Angka*, BPS DIY, berbagai edisi.

TABEL 6

**Data Pengeluaran Pemerintah Propinsi DIY
Tahun 1998 – 2003 dalam 000 rupiah**

Tahun	Pengeluaran rutin	Pengeluaran pembangunan	Total
1998/1999	81.108.872	43.230.734	124.339.606
1999/2000	104.997.630	53.014.934	158.012.564
2000	107.722.084	81.407.918	189.130.002
2001	274.975.337	54.310.863	329.286.200
2002	359.325.447	60.589.289	419.914.732
2003	437.747.116	59.468.252	497.215.368

Sumber : *DIY dalam angka*, BPS DIY, berbagai edisi.

Tabel 7, 8, dan 9 untuk menghitung kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) Kabupaten Sleman.

TABEL 7

**Data Jumlah Penduduk
Kabupaten Sleman Tahun 1998 –2003**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
1998	828.960
1999	887.523
2000	901.735
2001	915.081
2002	928.579
2003	942.231

Sumber : *Sleman Dalam Angka*, BPS DIY, berbagai edisi.

TABEL 8

**Data Jumlah Penduduk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 1998-2003**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
1998	3.077.341
1999	3.099.441
2000	3.121.701
2001	3.144.120
2002	3.166.701
2003	3.189.444

Sumber : *DIY Dalam Angka*, BPS DIY, berbagai edisi.

TABEL 9

**Data Jumlah Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Tahun 1998 /1999**

Tahun	Jumlah Kabupaten
1998	5
1999	5
2000	5
2001	5
2002	5
2003	5

Sumber : *DIY Dalam Angka*, BPS DIY, berbagai edisi.

Tabel 10 dan 11 digunakan untuk menghitung upaya fiskal (*tax effort*) Kabupaten Sleman.

TABEL 10

**Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 1993
Kabupaten Sleman Tahun 1998 – 2003**

Tahun	PDRB (dalam jutaan rupiah)	PDRB per kapita (dalam rupiah)
1998	1.377.233	1.661.398
1999	1.404.658	1.582.672
2000	1.451.772	1.609.976
2001	1.509.835	1.649.947
2002	1.578.866	1.700.303
2003	1.649.080	1.750.187

Sumber : *Sleman Dalam Angka*, BPS DIY, berbagai edisi.

TABEL 11

**Data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Sleman Tahun 1998 – 2003**

Tahun	PDRB (dalam jutaan rupiah)	PDRB per kapita (dalam rupiah)
1998	2.688.105	3.242.743
1999	3.175.312	3.577.724
2000	3.560.985	3.949.037
2001	4.119.788	4.502.102
2002	4.874.054	5.248.938
2003	5.456.414	5.790.951

Sumber : *Sleman Dalam Angka*, BPS DIY, berbagai edisi.

Tabel 12 dan 13 untuk menghitung kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) Kabupaten Sleman.

TABEL 12

**Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 1993
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Tahun 1998 – 2003**

Tahun	PDRB (dalam jutaan rupiah)	PDRB per kapita (dalam rupiah)
1998	4.777.199	1.556.764
1999	4.824.446	1.561.541
2000	5.017.709	1.607.702
2001	5.182.544	1.649.342
2002	5.395.052	1.693.733
2003	5.615.557	1.760.670

Sumber : *DIY Dalam Angka*, BPS DIY, berbagai edisi.

TABEL 13

**Data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Tahun 1998-2003**

Tahun	PDRB (dalam jutaan rupiah)	PDRB per kapita (dalam rupiah)
1998	9.863.894	3.214.384
1999	11.762.983	3.807.357
2000	13.093.980	4.195.383
2001	14.576.885	4.639.088
2002	16.712.889	5.221.153
2003	18.838.843	5.906.623

Sumber : *DIY Dalam Angka*, BPS DIY, berbagai edisi.

LAMPIRAN II

PERHITUNGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

A. Derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian fiskal)

1. Prosentase PAD terhadap TPD tahun 1998-2003

Tahun	PAD dlm 000 rupiah	BHPBP dlm 000 rupiah	DAU dlm 000 rupiah	DAK dlm 000 rupiah	SB dlm 000 rupiah	TPD dlm 000 rupiah	d (dalam %)
1998/1999	14786413	7797262	61021580	15081058	76102638	98686313	14.983
1999/2000	17125445	10350716	78219325	16177932	94397257	121873418	14.052
2000	17889885	11306375	70375140	22582507	92957647	122153907	14.645
2001	29571153	21094967	205430376	0	205430376	256096496	11.547
2002	38908193	27965557	255350000	0	255350000	322223750	12.075
2003	52978731	29278032	304780000	10600000	315380000	397636763	13.323

2. Prosentase BHPBP terhadap TPD tahun 1998-2003

Tahun	PAD dlm 000 rupiah	BHPBP dlm 000 rupiah	DAU dlm 000 rupiah	DAK dlm 000 rupiah	SE dlm 000 rupiah	TPD dlm 000 rupiah	d (dalam%)
1998/1999	14786413	7797262	61021580	15081058	76102638	98686313	7.901
1999/2000	17125445	10350716	78219325	16177932	94397257	121873418	8.493
2000	17889885	11306375	70375140	22582507	92957647	122153907	9.256
2001	29571153	21094967	205430376	0	205430376	256096496	8.237
2002	38908193	27965557	255350000	0	255350000	322223750	8.679
2003	52978731	29278032	304780000	10600000	315380000	397636763	7.363

3. Prosentase SB terhadap TPD tahun 1998-2003

Tahun	PAD dlm 000 rupiah	BHPBP dlm 000 rupiah	DAU dlm 000 rupiah	DAK dlm 000 rupiah	SB dlm 000 rupiah	TPD dlm 000 rupiah	d (dalam%)
1998/1999	14786413	7797262	61021580	15081058	76102638	98686313	77.116
1999/2000	17125445	10350716	78219325	16177932	94397257	121873418	77.455
2000	17889885	11306375	70375140	22582507	92957647	122153907	76.099
2001	29571153	21094967	205430376	0	205430376	256096496	80.216
2002	38908193	27965557	255350000	0	255350000	322223750	79.246
2003	52978731	29278032	304780000	10600000	315380000	397636763	79.314

B. Kebutuhan fiskal (Fiscal need)

Tahun	PT pem. Prop	PT pemda	jmlh pddk kab	jmlh pddk prop	jml kabupaten	PPP	SKF	IPPP
1998/1999	124339606	94794978	828960	3077341	5	114.354	40.405	2.830
1999/2000	158012564	120352292	887523	3099441	5	135.605	50.981	2.660
2000	189130002	118532973	901735	3121701	5	131.450	60.586	2.170
2001	329286200	293229916	915081	3144120	5	320.441	104.731	3.060
2002	419914736	338094057	928579	3166701	5	364.098	132.603	2.746
2003	497215368	447510560	942231	3189444	5	474.948	155.894	3.047

PT pem. Prop : Pengeluaran Total Pemerintah Propinsi

PT pem. Da : Pengeluaran Total Pemeintah Daerah

C. Kapasitas fiskal (Fiscal capacity)

Tahun	PDRB/kapita prop	PDRB/kapita kab	Jmlh kab	KFs	FC
1998/1999	1556764	1661398	5	311352.8	5.336
1999/2000	1561541	1582672	5	312308.2	5.068
2000	1607702	1609976	5	321540.4	5.007
2001	1649342	1649947	5	329868.4	5.002
2002	1693733	1700303	5	338746.6	5.019
2003	1760670	1750187	5	352134	4.970

D. Upaya fiskal (*tax effort*)

1. Sebelum otonomi daerah

Tahun	PAD(000)	Pertumb. PAD (%)	PDRB Harga konst(000000)	Pertmb PDRB Hrg konst(%)	PDRB hrg berlaku(000000)	Pertumb. PDRB harga berlaku(%)
1998/1999	14786413		1377233		2688105	
1999/2000	17125445	15,818	1404658	1,991	3175312	18,124
2000	17889885	4,463	1451722	3,350	3560985	12,145
	Rata-rata	10,140	Rata-rata	2,670		15.134

Elastisitas PAD terhadap PDRB atas dasar harga konstan : 3,798

Elastisitas PAD terhadap PDRB atas dasar harga berlaku : 0,67

2. Sesudah otonomi daerah

Tahun	PAD (000)	Pertumb. PAD(%)	PDRB Harga Konst(000000)	Pertumb.PDRB Hrg konst(%)	PDRB hrg berlaku(000000)	Pertumb.PDRB harga berlaku(%)
2001	29571153		1509835		4119788	
2002	38908193	31,574	1578866	4,572	4874054	18,308
2003	52978731	36,163	1649080	4,447	5904366	21,138
	Rata-rata	33,868	Rata-rata	4,509		19,723

Elastisitas PAD terhadap PDRB atas dasar harga konstan : 7,511

Elastisitas PAD terhadap PDRB atas dasar harga berlaku : 1,717